



## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

# **RENCANA KERJA PERUBAHAN BPBD KABUPATEN BEKASI**

# **2026**

## **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BEKASI**

Komplek Perkantoran Pemda Kabupaten Bekasi  
Desa Sukamahi, Kecamatan Cikarang Pusat, Kab. Bekasi 17530.  
Telp : 081219071900



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2025. Penyusunan Rencana Kerja ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut dari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 dan Rencana Strategis (RENSTRA) BPBD Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Bekasi Tahun 2026 .

Renja BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan BPBD Kabupaten Bekasi untuk periode 1 (satu) tahun yang akan dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan prioritas pada Tahun Anggaran 2026 di BPBD Kabupaten Bekasi. Dokumen ini memberikan gambaran tentang program dan kegiatan yang akan dikerjakan pada Tahun 2026 yang memuat diantaranya yaitu tujuan, sasaran dan target capaian kinerja yang akan di capai pada Tahun 2026.

Dengan terbitnya Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2026, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN BPBD dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan kerja dan kinerja yang terencana dan terarah untuk pencapaian sasaran pembangunan BPBD dan Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Bekasi,     Maret 2025

KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BEKASI,  
  
**H. MUCHLIS, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750707 199311 1 001

DAFTAR ISI

|                     |     |
|---------------------|-----|
| KATA PENGANTAR..... | i   |
| DAFTAR ISI .....    | ii  |
| DAFTAR TABEL.....   | iii |
| DAFTAR GAMBAR ..... | iv  |

|                                                                             |           |
|-----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>                                              | <b>1</b>  |
| 1.1 Latar belakang.....                                                     | 1         |
| 1.2 Landasan Hukum .....                                                    | 4         |
| 1.3 Maksud dan Tujuan.....                                                  | 5         |
| 1.4 Sistematika Penulisan .....                                             | 6         |
| <b>BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU ...</b>          | <b>9</b>  |
| 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu.....             | 9         |
| 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah .....                       | 20        |
| 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah ..... | 21        |
| 2.4 Review terhadap Rancangan awal RKPD .....                               | 26        |
| 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.....                  | 36        |
| <b>BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH .....</b>                    | <b>37</b> |
| 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional .....                              | 37        |
| 3.1.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian.....                           | 37        |
| 3.1.2 Telaahan rencana Strategis propinsi .....                             | 39        |
| 3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....                                | 41        |
| 3.3 Program dan Kegiatan .....                                              | 42        |
| <b>BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....</b>             | <b>54</b> |
| 4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan.....                                        | 54        |
| <b>BAB V PENUTUP .....</b>                                                  | <b>61</b> |

**DAFTAR TABEL**

Tabel 3.6    Rumusan rencana program dan kegiatan Tahun 2025 dan  
Prakiraan Maju Tahun 2026 BPBD Kabupaten Bekasi.....    45



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah mewajibkan setiap Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah ke dalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.

Sebagai sebuah dokumen resmi perangkat daerah, Renja-PD mempunyai kedudukan yang strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada perangkat daerah dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), sebagai implementasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Sasaran Daerah.

Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dijelaskan bahwa proses penyusunan Renja-PD terdiri dari 3 tahapan utama yaitu :

1. Tahap persiapan penyusunan Renja-PD, meliputi :

- Pembentukan Tim Penyusun Renja-PD
  - Orientasi mengenai Renja-PD
  - Penyusunan agenda kerja, serta
  - Penyiapan data dan informasi
2. Tahap penyusunan rancangan Renja- PD

3. Tahap penetapan Renja-PD.

Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja-PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan

rancangan Renja- PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Perangkat Daerah, evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra-PD..

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Tahun 2026 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2029 yang memuat berbagai program dan kegiatan untuk dilaksanakan pada Tahun 2026 dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target Sasaran dan Indikator Kinerja Utama BPBD Tahun 2026;
2. Program dan Kegiatan harus mengarah pada pencapaian target Sasaran dan Indikator Kinerja Utama Daerah pada Dokumen RKPD Tahun 2026 dan RPJMD Tahun 2025-2029.

Pemetaan Sasaran dan Indikator Sasaran Daerah Kabupaten Bekasi dengan Sasaran dan Indikator Sasaran BPBD Kabupaten Bekasi dapat digambarkan pada Tabel berikut :

## **1.2 Landasan Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;



- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
- 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
- 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
- 12 Peraturan Menteri Pemberdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional.
- 13 Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi, Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- 14 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- 15 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi No. 1 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 3 Tahun 2010 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2005-2025;
- 16 Peraturan Daerah Kabupaten Bekasi Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bekasi;
- 17 Surat Keputusan Bupati Bekasi Nomor 821.2/Kep.2265-BKPSDM/2021 tanggal 29 Desember 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi kedalam Jabatan Fungsional;
- 18 Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2023 tentang Kewenangan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi.

### 1.3 Maksud Dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Kerja BPBD Tahun 2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh BPBD selama kurun waktu 1 (satu) tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Bekasi.

Adapun tujuan penyusunan Rencana Kerja BPBD Tahun 2026 adalah :

1. Sebagai dokumen pelaksanaan program dan kegiatan yang berpedoman pada RKPD Kabupaten Bekasi Tahun 2026;
2. Pedoman bagi seluruh jajaran aparatur BPBD Kabupaten Bekasi dalam menjalankan program/kegiatan dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi.

### 1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2026 adalah sebagai berikut :

#### **BAB I      PENDAHULUAN**

##### 1.1. Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja-PD, proses penyusunan Renja-PD, keterkaitan antara Renja-PD dengan dokumen RKPD, Renstra-PD, dengan Renja K/L dan Renja Provinsi/Kabupaten/Kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

##### 1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah.

##### 1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan maksud dan tujuan dari penyusunan Renja- PD.

##### 1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja-PD, serta susunan garis besar isi dokumen.

## **BAB II       EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU**

- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja-PD tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD 2025. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaiantarget Renstra-PD berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja-PD tahun-tahun sebelumnya.
- 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah  
Berisi kajian terhadap capaian kinerja pelayanan perangkat daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah, serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kinerja pelayanan.
- 2.3 Isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, sub bab ini berisi uraian mengenai:
- 1) Sejauhmana tingkat kinerja pelayanan perangkat daerah dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan perangkat daerah;
  - 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi perangkat daerah;
  - 3) Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/global, seperti SPM dan SDGs (*Sustainable Development Goals*);
  - 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan perangkat daerah; dan
  - 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun rencana.
- 2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Sub-bab ini berisikan uraian mengenai:
- 1) Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan;
  - 2) Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

- 3) Penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya: terdapat rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat di rancangan awal RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.

### **BAB III TUJUAN DAN SASARAN**

#### **3.1. Telaahan terhadap kebijakan nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah.

#### **3.2. Tujuan dan Sasaran Renja-PD**

Perumusan tujuan dan sasaran yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra- PD.

### **BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **3.3. Rencana Program dan Kegiatan Berisikan penjelasan mengenai:**

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, misalnya pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah, Pencapaian SDGs, Pengentasan Kemiskinan, Pencapaian SPM, Pendayagunaan Potensi Ekonomi Daerah, Pengembangan Daerah Terisolir, dan sebagainya.
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan, yang meliputi :
  - Jumlah program dan jumlah kegiatan.
  - Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan
- c. Tabel rencana program dan kegiatan

### **BAB V PENUTUP**

## BAB II

### HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

#### 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Dalam rangka memastikan kesinambungan serta kesesuaian program dan kegiatan yang telah ditetapkan dengan realisasinya, perlu dilakukan Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) yaitu Tahun 2024 dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1) yaitu Tahun 2025, mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Perangkat Daerah sudah disahkan.

Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Pokok-pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan;
4. Faktor-faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan;
5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah; dan
6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan realisasi Renstra Perangkat Daerah mengacu pada hasil laporan kinerja tahunan Perangkat Daerah dan/atau realisasi APBD, sebagaimana dapat dilihat dalam Table berikut :

#### 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Untuk mendukung pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta memperhatikan tugas pokok, fungsi, kondisi lingkungan dan isu strategis,

maka Sasaran BPBD Kabupaten Bekasi 2023-2026 adalah “Meningkatnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana” Sasaran tersebut diukur keberhasilannya melalui indikator Indeks Ketahanan Daerah (IKD). Berdasarkan pendekatan yang dikembangkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Indeks Ketahanan Daerah terdiri dari 7 prioritas penilaian. Tiap-tiap prioritas memiliki bobot penilaian yang telah ditentukan sebagaimana tabel dibawah ini.

Dalam mencapai tujuan, BPBD Kabupaten Bekasi melaksanakan program kerja strategis 5 (lima) tahunan sebagai strategi dan kebijakan yang ditetapkan dan diwujudkan dalam beberapa program Kegiatan.

**2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah**

Dalam mencapai tujuan dan sasaran, dapat dilakukan dengan beberapa cara. Dalam konteks perencanaan pembangunan, pencapaian tujuan dan sasaran dilaksanakan melalui pendekatan kebijakan dengan strategi operasional berupa rangkaian program, dan kegiatan yang berkesinambungan. Setiap strategi operasional tersebut menunjukkan adanya keterkaitan yang jelas sebagai suatu sistem operasional BPBD Kabupaten Bekasi.

Perumuskan Kebijaksanaan, program, dan kegiatan pembangunan dengan dilaksanakan dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi dan Renstra BPBD Kabupaten Bekasi. Adapun strategi BPBD Kabupaten Bekasi mencapai tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

Analisis dan pengelompokan terhadap permasalahan-permasalahan sebagaimana teridentifikasi pada tabel diatas menghasilkan beberapa isu strategis BPBD 2023-2026 sebagai berikut:

- 1. Pembentukan dan Pembinaan Desa Tangguh Bencana;
- 2. Pembentukan Platform Penanggulangan Bencana;
- 3. Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Bencana Alam dan Non Alam;
- 4. Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana

**2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Berdasarkan hasil review rancangan awal RKPD Tahun Anggaran 2025, bahwa rencana kerja hasil analisis belum dapat dilaksanakan sebagaimana rencana awal semestinya, mengingat adanya kebijakan Bupati Bekasi sebagaimana yang tertuang dalam Surat Edaran Nomor PR.03.02/SE-09/Bappeda Tanggal 12 Januari 2024 tentang PEDOMAN PENYUSUNAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025 yang menyatakan bahwa ada beberapa barang yang tidak diperbolehkan untuk diadakan pada tahun 2025. Menindaklanjuti Surat Edaran tersebut maka anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Bekasi untuk dialokasikan pada program dan kegiatan Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bekasi mengalami perubahan serta bertambahnya Pagu yang dikarenakan gaji pegawai non PNS yang dimasukkan ke dalam gaji PPPK.

## 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat dilakukan berdasarkan usulan yang diperoleh dari pelaksanaan Forum Perangkat Daerah, Daftar Usulan Musrenbang Desa/Kelurahan dan Usulan POKPIR DPRD Dalam Rangka Penyusunan RKPD Tahun 2025 yang harus diverifikasi pada tahap verifikasi TAPD pada tahun anggaran 2025.

## B A B III

### TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

#### 3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Propinsi

##### 3.2.1 Telaahan Rencana Strategis Kementerian

BPBD Kabupaten Bekasi merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan Kebencanaan. Secara kelembagaan urusan Kebencanaan memiliki instansi pembina tingkat nasional yaitu Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Mengacu kepada Renstra BNPB maupun Renstra BPBD Provinsi Jawa Barat, terlihat bahwa sasaran penanggulangan bencana difokuskan pada upaya penurunan risiko bencana. Untuk itu, BNPB menyusun visi dan misi yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan pelaksanaan kegiatan utama dan kegiatan pendukung yang dikaitkan dengan RPJMN 2020-2024.

#### A. Visi BNPB 2020 - 2024

“Ketangguhan bangsa dalam menghadapi bencana ”

#### B. Misi BNPB tahun 2020-2024

1. Melindungi bangsa dari ancaman bencana dengan membangun budaya pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana menjadi bagian yang terintegrasi dalam pembangunan nasional;
2. Membangun sistem penanganan darurat bencana secara cepat, efektif dan efisien;
3. Menyelenggarakan pemulihan wilayah dan masyarakat pascabencana melalui rehabilitasi dan rekonstruksi yang lebih baik yang terkoordinasi dan berdimensi pengurangan risiko bencana;
4. Menyelenggarakan dukungan dan tata kelola logistik dan peralatan penanggulangan bencana;
5. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara transparan dengan prinsip good governance.

#### C. Sasaran Strategis

1. Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana
2. Terselamatkannya sebanyak mungkin jiwa pada saat keadaan darurat bencana
3. Terpulihkannya Sarana dan prasarana, sosial ekonomi, dan produktivitas sumber daya alam pada daerah terdampak bencana
4. Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan

#### D. Telaahan Keterkaitan antara Renstra K/L dan Perangkat Daerah

BNPB dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) BNPB Tahun 2020-2024. Dalam Menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu adanya keterkaitan dan keselarasan antara



Dokumen Perencanaan Daerah/ Perangkat Daerah dengan Pemerintah Pusat / Kementerian/ instansi Pembina di tingkat Pusat sehingga pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat dan daerah menjadi terintegrasi.

Adapun keterkaitan Dokumen Perencanaan (Renstra) BNPB Tahun 2020-2024 dengan Dokumen Perencanaan (Rencana Strategis Tahun 2023-2026 dan Renja Tahun 2025) BPBD Kabupaten Bekasi adalah sebagai berikut :

### 3.2.2. Telaahan Rencana Strategis Provinsi

BPBD Provinsi Jawa Barat untuk periode waktu 2018-2024 akan mewujudkan Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat yaitu ***“Menjadi Penggerak Utama Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Jawa Barat”***. Adapun Misi dari BPBD Provinsi Jawa Barat Meningkatkan upaya preventif, edukatif dan implementatif penanggulangan bencana pada saat terjadi dan pasca bencana dan Meningkatkan kapasitas sumber daya organisasi untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

#### A. Tujuan BPBD Provinsi Jawa Barat

Tujuan dibentuknya BPBD Provinsi adalah untuk menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan terkoordinasi dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, resiko dan dampak bencana.

#### B. Sasaran BPBD Provinsi Jawa Barat

Sasaran jangka menengah periode Tahun 2020-2024 Meningkatnya masyarakat sadar bencana dan terlaksananya penanganan korban bencana melalui kerjasama Sinergis dengan Stakholder dalam sistem jaringan yang terintegrasi

#### C. Telaahan keterkaitan antara Renstra provinsi dan Perangkat Daerah

BPBD Propinsi Jawa Barat merupakan perangkat daerah yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan penyelenggaraan perumusan, penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi. BPBD Propinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan tugas jangka waktu tahun 2020-2024 memiliki panduan yaitu Rencana Strategis (Renstra) BPBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024.

Dalam menyusun Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah perlu adanya keterkaitan dan keselarasan antara Dokumen Perencanaan Daerah/ Perangkat Daerah dengan Pemerintah Propinsi /instansi Pembina perencanaan di tingkat propinsi sehingga pelaksanaan program dan kegiatan antara pusat dan daerah menjadi terintegrasi.

Adapun keterkaitan Renstra BPBD Propinsi Jawa Barat Tahun 2020-2024 dengan Rencana Strategis BPBD Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 dan Renja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

Secara umum, telah terdapat keselarasan antara sasaran pada Renstra BPBD Propinsi Jawa Barat dengan Renstra/ Renja BPBD Kabupaten Bekasi.

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Berdasarkan Tujuan dan Sasaran Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2026, maka Tujuan dan Sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

### **3.3 Program dan Kegiatan**

Pada Tahun Anggaran 2025 BPBD Kabupaten Bekasi memiliki 2 Program, 12 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis BPBD Tahun 2025-2026. Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BPBD Kabupaten Bekasi.

**Tabel 3.6 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi**

| Kode Rekening |    |    |      |    | Rancangan Awal RKPD                                                                       |             |                                                                                                                                                                        | Prakiraan Tahun 2025 |                      | Catatan Penting | Prakiraan Maju Tahun 2026 |                      |
|---------------|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------|---------------------------|----------------------|
|               |    |    |      |    | Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan                                    | Lokasi      | Indikator Kinerja Keluaran                                                                                                                                             | Target Capaian       | Pagu Indikatif (Rp.) |                 | Target Capaian            | Pagu Indikatif (Rp.) |
| 1             |    |    |      |    | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                                       |             |                                                                                                                                                                        |                      |                      |                 |                           |                      |
| 1             | 05 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                           |             |                                                                                                                                                                        |                      |                      |                 |                           |                      |
| 1             | 05 |    |      |    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT |             |                                                                                                                                                                        |                      |                      |                 |                           |                      |
| 1             | 05 | 01 |      |    | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                               |             |                                                                                                                                                                        |                      |                      |                 |                           |                      |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 |    | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                          |             | Tersedianya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang sesuai dengan ketentuan                                                      |                      |                      |                 |                           |                      |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 01 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                           | Kab. Bekasi | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                                                                                                                            | 2 Dokumen            |                      |                 | 2 Dokumen                 |                      |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 06 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD     | Kab. Bekasi | Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 10 Laporan           |                      |                 | 8 Laporan                 |                      |
| 1             | 05 | 01 | 2.01 | 07 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                         | Kab. Bekasi | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                                                                                                       | 2 Laporan            |                      |                 | 2 Laporan                 |                      |

|   |    |    |      |    |                                                                                 |             |                                                                                                                                                    |                |  |  |                |  |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--|--|----------------|--|
| 1 | 05 | 01 | 2.02 |    | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                          |             | Tersedianya Laporan Keuangan Perangkat Daerah                                                                                                      |                |  |  |                |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 01 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                               | Kab. Bekasi | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN                                                                                                  | 70 Orang/bulan |  |  | 30 Orang/bulan |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.02 | 07 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD | Kab. Bekasi | Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD | 2 Laporan      |  |  | 4 Laporan      |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 |    | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah                          |             | Jumlah barang yang diadakan yang tercatat dalam buku inventaris barang perangkat daerah                                                            |                |  |  |                |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.03 | 02 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                             | Kab. Bekasi | Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                                                                                 | 1 Dokumen      |  |  | 1 Dokumen      |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 |    | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                                       |             | Tersedianya Dokumen administrasi kepegawaian perangkat daerah                                                                                      |                |  |  |                |  |

|   |    |    |      |    |                                                               |             |                                                                                     |          |   |  |          |  |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------|---|--|----------|--|
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 02 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya        | Kab. Bekasi | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan                              | 85 Paket | - |  | 85 Paket |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.05 | 09 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi | Kab. Bekasi | Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan | 30 Orang | - |  | 30 Orang |  |

|          |           |           |             |    |                                                                  |             |                                                                                    |         |  |  |         |  |
|----------|-----------|-----------|-------------|----|------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|--|
| <b>1</b> | <b>05</b> | <b>01</b> | <b>2.06</b> |    | <b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>                        |             | <b>Tersedianya layanan administrasi umum perangkat daerah selama 12 bulan</b>      |         |  |  |         |  |
| 1        | 05        | 01        | 2.06        | 01 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | Kab. Bekasi | Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan | 5 Paket |  |  | 5 Paket |  |
| 1        | 05        | 01        | 2.06        | 02 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     | Kab. Bekasi | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan                     | 1 Paket |  |  | 1 Paket |  |
| 1        | 05        | 01        | 2.06        | 03 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                | Kab. Bekasi | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan                                | 1 Paket |  |  | 1 Paket |  |
| 1        | 05        | 01        | 2.06        | 04 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 | Kab. Bekasi | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                                 | 3 Paket |  |  | 1 Paket |  |
| 1        | 05        | 01        | 2.06        | 05 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          | Kab. Bekasi | Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan                          | 3 Paket |  |  | 2 Paket |  |

|   |    |    |      |    |                                                          |             |                                                                               |           |  |  |           |  |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|--|
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 06 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | Kab. Bekasi | Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan | 1 Dokumen |  |  | 2 Dokumen |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 08 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                | Kab. Bekasi | Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu                                      | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 09 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD     | Kab. Bekasi | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD           | 1 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |

|   |    |    |      |    |                                                                              |             |                                                                                                |           |  |  |           |  |
|---|----|----|------|----|------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|--|
| 1 | 05 | 01 | 2.06 | 10 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                        | Kab. Bekasi | Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                           | 1 Dokumen |  |  | 1 Dokumen |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 |    | <b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>      |             | <b>Jumlah barang milik daerah yang diadakan dalam satu tahun</b>                               |           |  |  |           |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 06 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                        | Kab. Bekasi | Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan                                        | 23 Unit   |  |  | 2 Unit    |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 10 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya           | Kab. Bekasi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan           | 9 Unit    |  |  | 5 Unit    |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.07 | 11 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Kab. Bekasi | Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan | 4 Unit    |  |  | 1 Unit    |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 |    |                                                                              |             |                                                                                                |           |  |  |           |  |

|   |    |    |      |    | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                  |             | Tersedianya layanan jasa penunjang urusan pemerintahan perangkat daerah selama 12 bulan |           |  |  |           |  |
|---|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|--|-----------|--|
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 02 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik               | Kab. Bekasi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan  | 3 Laporan |  |  | 3 Laporan |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.08 | 04 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                 | Kab. Bekasi | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                    | 3 Laporan |  |  | 1 Laporan |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 |    | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |             | Jumlah barang milik daerah yang dipelihara dalam setahun                                |           |  |  |           |  |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                     |             |                                                                                                        |         |  |  |         |  |
|---|----|----|------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--|--|---------|--|
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 01 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan | Kab. Bekasi | Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya | 6 Unit  |  |  | 7 Unit  |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 02 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     | Kab. Bekasi | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 43 Unit |  |  | 42 Unit |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 06 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                                                            | Kab. Bekasi | Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara                                                     | 28 Unit |  |  | 30 Unit |  |
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 09 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                                        | Kab. Bekasi | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                               | 3 Unit  |  |  | 1 Unit  |  |

|   |    |    |      |    |                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |  |           |  |
|---|----|----|------|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|-----------|--|
| 1 | 05 | 01 | 2.09 | 10 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                    | Kab. Bekasi | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                                                                                                                                 | 95 Unit    |  |  | 80 Unit   |  |
| 1 | 05 | 03 |      |    | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>                                                                 |             |                                                                                                                                                                                                                                                |            |  |  |           |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 |    | <b>Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</b>                                               |             | <b>Jumlah Pelayanan informasi Rawan Bencana</b>                                                                                                                                                                                                |            |  |  |           |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 1  | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                       | Kab. Bekasi | Jumlah dokumen kajian risiko bencana yang dilegalisasi                                                                                                                                                                                         | 1 Dokumen  |  |  | 1 Dokumen |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.01 | 02 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) | Kab. Bekasi | Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi                                                                                                | 3123 Orang |  |  | 150 Orang |  |
|   |    |    |      |    |                                                                                                       |             | dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun                                                                                                                                           |            |  |  |           |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 |    | <b>Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana</b>                                        |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Jumlah Tenaga Pusdalops dan Relawan yang mendapatkan Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana.</li> <li>○ Jumlah Regulasi yang disusun</li> <li>○ Jumlah Kawasan yang dibentuk dan dibina</li> </ul> |            |  |  |           |  |



|   |    |    |      |    |                                                                                                    |             |                                                                                                                               |            |  |  |            |  |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|------------|--|
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 02 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                                           | Kab. Bekasi | Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang dilegalisasi                                                               | 1 Dokumen  |  |  | 1 Dokumen  |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 02 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota                                           | Kab. Bekasi | Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana                                     | 100 Orang  |  |  | 100 Orang  |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 03 | Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bekasi | Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota       | 2 Laporan  |  |  | 1 Dokumen  |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 04 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                               | Kab. Bekasi | Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas                                       | 150 Unit   |  |  | 10 Unit    |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 05 | Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota                                                          | Kab. Bekasi | Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani | 1 Kegiatan |  |  | 1 Kegiatan |  |

|   |    |    |      |    |                                                                      |             |                                                                                                                                                                                                      |              |  |  |              |  |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--------------|--|
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 06 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan       | Kab. Bekasi | Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana                                                                                                             | 30 Kawasan   |  |  | 40 Kawasan   |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 08 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bekasi | Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya                                                                                                                             | 70 Orang     |  |  | 75 Orang     |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 09 | Penyusunan Rencana Kontijensi                                        | Kab. Bekasi | Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi                                                                                                                                                 | 1 Dokumen    |  |  | 1 Dokumen    |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 10 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                                 | Kab. Bekasi | Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan                                                                                                                                  | 1150 Orang   |  |  | 250 Orang    |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 11 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana                | Kab. Bekasi | Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi                                                                                                                   | 1 Dokumen    |  |  | 1 Dokumen    |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.02 | 12 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                              | Kab. Bekasi | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                                                                                                               | 100 Keluarga |  |  | 300 Keluarga |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 |    | <b>Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>            |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Jumlah Laporan Penanganan Darurat Bencana yang tersedia.</li> <li>➤ Jumlah Pengerahan Tim Penyelamatan, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana.</li> </ul> |              |  |  |              |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 02 | Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota                          | Kab. Bekasi | Jumlah Dokumen SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji Cepat                                                       | 2 Dokumen    |  |  | 2 Dokumen    |  |

|   |    |    |      |    |                                                                             |             |                                                                                                                                                               |            |  |  |             |  |
|---|----|----|------|----|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|-------------|--|
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 03 | Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota           | Kab. Bekasi | Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana                                                                    | 2500 Orang |  |  | 2500 Orang  |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 04 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota | Kab. Bekasi | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                                                           | 4500 Orang |  |  | 10000 Orang |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 05 | Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                          | Kab. Bekasi | Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana                                                                                 | 3 Laporan  |  |  | 2 Laporan   |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.03 | 06 | Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit                        | Kab. Bekasi | SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi KLB dan Epidemiologi Terpadu | 1 Dokumen  |  |  | 1 Dokumen   |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 |    | <b>Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</b>                         |             | <b>Jumlah Sistem Pemulihan Pasca Bencana yang dibuat</b>                                                                                                      |            |  |  |             |  |
|   | 05 | 03 | 2.04 | 02 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana                                  | Kab. Bekasi | Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah                                                                            | 1 Dokumen  |  |  | 1 Dokumen   |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 02 | Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota                                | Kab. Bekasi | Jumlah Dokumen Tata Kelola Kelembagaan Bencana Daerah                                                                                                         | 1 Dokumen  |  |  | 1 Dokumen   |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 04 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan                    | Kab. Bekasi | Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia                                                                                                           | 1 Dokumen  |  |  | 1 Dokumen   |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 05 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana             | Kab. Bekasi | Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana                                                                                            | 1 Laporan  |  |  | 1 Laporan   |  |

|   |    |    |      |    |                                                                                                                            |             |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |  |  |           |  |
|---|----|----|------|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|-----------|--|
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 08 | Bimbingan Teknis Pasca Bencana Kabupaten/Kota                                                                              | Kab. Bekasi | Jumlah Aparatur BPBD Kabupaten/Kota dan lintas perangkat daerah Kabupaten/Kota yang memiliki kemampuan teknis dalam menyusun dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) | 170 Orang  |  |  | 170 Orang |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 10 | Koordinasi Penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                                                                          | Kab. Bekasi | Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekontruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilegalkan                                                                             | 2 Kegiatan |  |  | 1 Laporan |  |
| 1 | 05 | 03 | 2.04 | 13 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dab Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota | Kab. Bekasi | Jumlah Dokumen Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dab Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota                                                                                                       | 1 Dokumen  |  |  | 1 Dokumen |  |

## **BAB IV**

### **RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH**

#### **4.1 Rencana Kerja dan Pendanaan**

Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi terdiri dari program Pemerintah Kabupaten Bekasi sebagaimana tertuang dalam RPD Kabupaten Bekasi Tahun 2025-2026. Program pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi terdiri dari Program Urusan dan Penunjang Urusan Pemerintah yang meliputi:

1. Program Urusan Perencanaan
  - a) Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah
  - b) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Program Penunjang Urusan Pemerintah
  - a) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab III, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi menetapkan program-program yang selanjutnya dijabarkan dalam kegiatan dan Sub kegiatan.

Rencana Program,

## BAB V

### PENUTUP

Rencana Kerja Tahun 2025 tertuang dalam Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bekasi Tahun 2023-2026 memuat Kerangka Kerja Tahunan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi. Dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah berisikan daftar Program, Kegiatan dan Pagu indikatif SKPD serta sumber pendanaanya dan kaidah pelaksanaan yang perlu ditetapkan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi yaitu :

1. Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi tidak hanya memuat program/ kegiatan dan pelayanan public tetapi juga memuat strategi pelaksanaan baik yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah ataupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
2. Unit kerja dan seluruh pihak terkait pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program renja ini dengan sebaik – baiknya.
3. Rencana Kerja (RENJA) pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi Tahun 2025 terdiri dari 2 Program, 12 Kegiatan dan 48 Sub Kegiatan.
4. Berdasarkan Rapat Forum bahwa untuk Gaji Pegawai Non-PNS menyesuaikan dengan PPPK dan Penambahan Pagu pada sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
5. Dalam rangka meningkatkan efesiensi dan efektifitas pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025, maka Perangkat Daerah berkewajiban untuk melakukan evaluasi dan monitoring program dan kegiatan.

Cikarang Pusat,    Maret 2025

**KEPALA PELAKSANA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BEKASI,**



**H. MUCHLIS, S.Sos, M.AP**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19750707 199311 1 001